

PENGARUH SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Sri Rahayu

Eka Safitri Magdalena Ginting

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

Email : ekasafitrimagdalenaginting@gmail.com

Abstract

General Allocation Funds (DAU) is the amount of funds allocated to each autonomous regins (Province/District/City) in Indonesia each year as development funds. General Allocation Funds and various forms of transfers from Government Center should only be a supplement for the implementation of government and regional development. Seen from DAU in Government of Medan in 2008 - 2015 shows that DAU which comes from Government Center each year continues to show improvement. The purpose of this research is to find out how much the influence of Local Taxes, Local Retributions, Profit Part of BUMD, and Other Legal PAD to DAU in Government of Medan. This research conducted in Government of Medan by using secondary data and quantitative sourced from Actual Receipt Municipality Government of Medan in 2008 - 2015 obtained from Badan Pusat Statistik Kota Medan. With limited data, this study used quarterly data through interpolation of annual data by using EViews. The analyzing data method used statistic method with SPSS. The result of the research with simultaneous test showed that Local Taxes, Local Retributions, Profit Part of BUMD, and Other Legal PAD affect DAU. The result of partial test showed that Local Taxes and Other Legal PAD affect DAU significantly but Local Retributions and Profit Part of BUMD did not. Amounted to 59,1% change in DAU can be explained by four independent variables and the rest 40,9% explained by another factors that not included in this research.

Key Words: *Local Taxes, Local Retributions, Profit Part of BUMD, Other Legal PAD, and General Allocation Fund (DAU).*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal

sebagai era otonomi daerah. Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing karena daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu daerah juga diberikan sumber-sumber pembiayaan kewenangan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Kemandirian daerah tersebut dimanifestasikan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dan kuat. Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-Lain Penerimaan yang Sah.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya, disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi daerah. Untuk mengukur tingkat

kemandirian daerah dapat dilakukan dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam upaya meningkatkan PAD, dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat sebaiknya hanya bersifat suplemen bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jenis Penerimaan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Pajak Daerah	609.379	892.674	881.346	1.167.399	1.249.252
Retribusi Daerah	236.694	127.839	188.459	174.670	175.768
Bagian Laba BUMD	11.727	9.780	9.503	10.096	7.405
Lain-Lain PAD yang Sah	137.271	117.607	126.859	163.520	246.810
Total PAD	995.072	1.147.901	1.206.169	1.515.685	1.679.237

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2016

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan
Tahun 2011-2015 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Dana Alokasi Umum	1.066.353	1.153.789	1.270.244	1.393.504	1.528.724

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2016

Dari data tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Pajak Daerah selama tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan, kemudian meningkat lagi pada tahun 2014 dan 2015. Pada pos Retribusi Daerah tahun 2012 mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2013, menurun lagi pada tahun 2014, kemudian meningkat lagi pada tahun 2015. Pada pos Bagian Laba BUMD tahun 2012 dan tahun 2013

mengalami penurunan yang cukup signifikan, kemudian meningkat di tahun 2014 dan menurun lagi di tahun 2015. Sementara pada pos Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan di tahun 2012 kemudian meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa DAU yang berasal dari pemerintah pusat setiap

tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Tentunya hal ini tidak diinginkan sebab DAU dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat lainnya sebaiknya hanya bersifat suplemen bagi Pemerintah Daerah Kota Medan. Oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ironisnya terjadiketidakstabilan laju pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Hal ini tentunya tidak diinginkan mengingat salah satu ukuran kemandirian suatu daerah di daerah otonomi adalah ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan. Berdasarkan uraian dan tujuan peneliti, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintahan Kota Medan"**.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang

menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formuladan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Kuncoro dalam bukunya hal penting dari peraturan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 7 menggariskan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit dua puluh lima persen (25%) dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selain itu menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, Lain-Lain PAD yang Sah.

2.2.1. Pajak Daerah

Menurut Yani (2002:45), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan terhadap Undang-Undang ini dilakukan tidak terlepas dari adanya keinginan dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan otonomi yang benar-benar memberikan keleluasaan dari daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menjelaskan perbedaan antara Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten. Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

2.1.2. Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2005:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Yani (2002:55), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang

dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

2.1.3. Bagian Laba BUMD

Sumber penerimaan PAD yang lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas Laba BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan atau Bagian Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan sepenuhnya atau sebagian, dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan bagi daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi indikator kuat dan lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,

2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

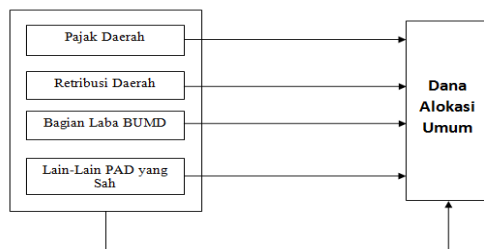
2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terdahulu, dimana dipakai sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan peneliti dan peneliti juga ingin meneliti pengaruh sumber-sumber PAD yang dikelola Pemerintahan Kota Medan terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependennya. Tiodora Delima Nababan (2008), Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD sebagai variabel independen (yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependen. Secara parsial, Pajak Daerah dan bagian Laba BUMD pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum, sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependennya.

Rumiris Agustina Sinaga (2009), Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan Kota Tanjung Balai, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD sebagai variabel independen (yang terdiri dari: Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependen. Secara parsial, hanya Pajak Daerah yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum, sedangkan Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum sebagai variabel dependennya.

2.3. Kerangka Konseptual



Hipotesis

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan.
2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan.
3. Bagian Laba BUMD berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan.
4. Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan pada tahun 2017.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Kota Medan. Sampel pada penelitian ini merupakan Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Dimana karena ada keterbatasan data maka penelitian ini menggunakan data kuartalan melalui proses interpolasi data tahunan sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi 32 (tiga puluh dua). Adapun proses interpolasi data tahunan diolah dengan menggunakan perangkat Eviews.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif yaitu menggunakan data *Time Series* tahun 2008-2015 yang bersumber dari Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu, Sumber Pendapatan Asli Daerah (yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, Lain-Lain PAD yang Sah), dan Dana Alokasi Umum.

3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum yang dilambangkan dengan (Y). Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

3.4.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilambangkan dengan (X). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah (X₁). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah (X₂). Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang

berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

c. Bagian Laba BUMD (X₃). Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya.

d. Lain-Lain PAD yang Sah (X₄). Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Lain-Lain PAD yang Sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan, Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjudalanda/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul agar dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mengukur pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis data ini terdiri dari : **analisis Statistik Deskriptif, dan analisis Regresi Linier Berganda.**

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik dari data. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang

sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui variabel bebas berpengaruh terhadap

variabel terikat. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	32	1244077,00	9458327,00	3797184,3750	2065283,51769
Retribusi Daerah	32	1856093,00	6120659,00	4048778,0938	1173165,54972
Bagian Laba BUMD	32	1019609,00	3047016,00	1979531,2188	680398,14608
Lain-Lain PAD yang Sah	32	-7993000,00	7909938,00	2705146,0938	3495537,91206
Dana Alokasi Umum	32	1883219,00	3955119,00	2791311,6250	644966,66503
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Dari tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari sampel sebanyak 32, diperoleh data deskripsi sebagai berikut :

- a. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai minimum 1244077,00 dan nilai maksimum 9458327,00. Rata-ratanya 3797184,3750 dengan standar deviasi 2065283,51769.
- b. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai minimum 1856093,00 dan nilai maksimum 6120659,00. Rata-ratanya 4048778,0938 dengan standar deviasi 1173165,54972.
- c. Variabel Bagian Laba BUMD memiliki nilai minimum 1019609,00 dan nilai maksimum 3047016,00. Rata-ratanya 1979531,2188 dengan standar deviasi 680398,14608.
- d. Variabel Lain-Lain PAD Yang Sah memiliki nilai minimum -7993000,00 dan nilai maksimum 7909938,00. Rata-ratanya 2705146,0938 dengan standar deviasi 3495537,91206.
- e. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum 1883219,00 dan nilai maksimum 3955119,00. Rata-ratanya

2791311,6250 dengan standar deviasi 644966,66503.

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Dana Alokasi Umum. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3163907,990	543500,703		5,821	,000
Pajak Daerah	-,168	,058	-,537	-2,911	,007
Retribusi Daerah	,046	,091	,084	,508	,616
Bagian Laba BUMD	-,081	,221	-,086	-,368	,716
Lain-Lain PAD yang Sah	,088	,025	,476	3,535	,001

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 3163907,990 + (-0,168)X_1 + 0,046X_2 + (-0,081)X_3 + 0,088X_4 + \varepsilon$$

Dengan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta adalah sebesar 3163907,990, hal ini menyatakan bahwa jika faktor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah diabaikan maka nilai Dana Alokasi Umum sebesar 3163907,990.
- Koefisien regresi untuk variabel Pajak Daerah sebesar -0,168, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor Pajak Daerah maka Dana Alokasi Umum akan menurun sebesar 16,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Koefisien regresi untuk variabel Retribusi Daerah sebesar 0,046, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor Retribusi Daerah maka Dana Alokasi Umum akan meningkat sebesar 46% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- Koefisien regresi untuk variabel Bagian Laba BUMD sebesar -0,081, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor Bagian Laba BUMD maka Dana Alokasi Umum akan menurun sebesar 8,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Koefisien regresi untuk variabel Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 0,088, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor Lain-Lain PAD yang Sah maka Dana Alokasi Umum akan meningkat sebesar 8,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

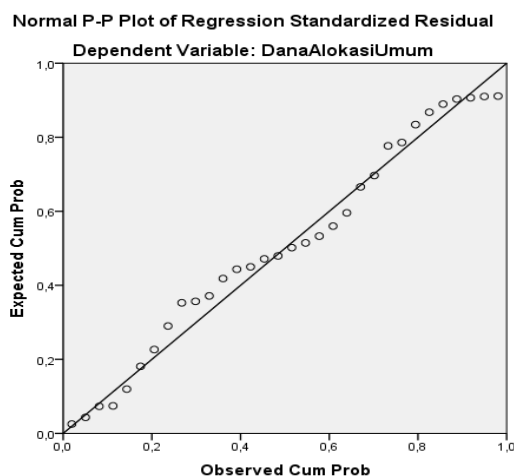
Pengujian normalitas data adalah untuk melihat normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data ini digunakan pendekatan grafik yaitu *Normality Probability Plot*. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan SPSS,

2016

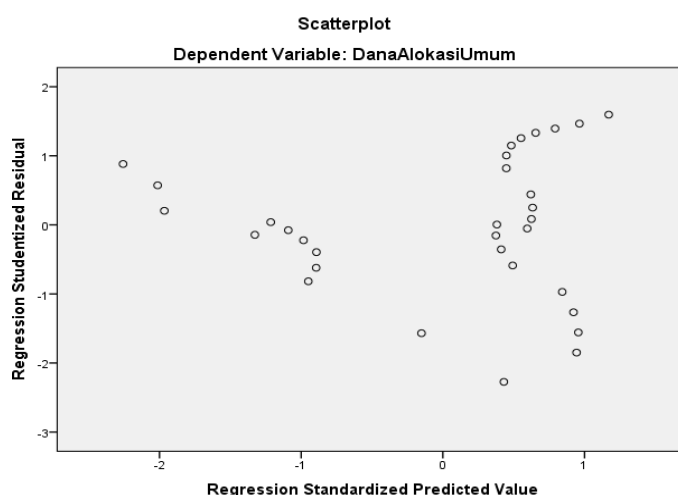
Pada *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* terlihat titik-titik yang mengikuti data di sepanjang garis diagonal. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan karena data sudah menyebar dengan karakteristik menyerupai populasi yang diwakili.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual

dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas dan model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Pada grafik *Scatterplot*, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Dana Alokasi Umum berdasarkan masukan variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD yang Sah.

4.3.3. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas.

Menurut Ghazali (2005:95), Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan problem autokorelasi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	,445	2,248
Retribusi Daerah	,549	1,820
Bagian Laba BUMD	,278	3,599
Lain Lain PAD yang Sah	,834	1,199

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Dari tabel *Coefficient* di atas dapat dilihat bahwa semua angka VIF berada dibawah 10 dan juga semua angka *Tolerance* lebih besar dari 0,10, hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang di uji.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,769 _a	,591	,531	441879,61697	,286

4.3.4. Uji Autokorelasi

- a. Predictors: (Constant), LainLainPADyangSah,
b. RetribusiDaerah, PajakDaerah, BagianLabaBUMD
b. Dependent Variable: DanaAlokasiUmum
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,286. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel sebanyak 32 (n=32) dan jumlah variabel (bebas dan terikat) sebanyak 5(k=5), maka dari tabel statistik *Durbin-Watson* didapatkan nilai batas bawah (dL) sebesar 1,177 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,732. Nilai DW < dL (0,286 < 1,177) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial). Hasil pengolahan data dengan program statistik (SPSS) untuk uji t ditampilkan pada tabel:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

- a. Dependent Variable:
DanaAlokasiUmum

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3163907,99 0	543500,703		5,821	,000
Pajak Daerah	-,168	,058	-,537	-2,911	,007
Retribusi Daerah	,046	,091	,084	,508	,616
Bagian Laba BUMD	-,081	,221	-,086	-,368	,716
Lain Lain PAD yang Sah	,088	,025	,476	3,535	,001

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Pengujian untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Dana Alokasi Umum (Y)

Terlihat pada tabel *Coefficients* terdapat nilai sig. pada kolom = 0,007. Nilai sig. pada kolom lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,007 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Variabel Pajak Daerah mempunyai t-hitung yakni 2,911 dengan t-tabel dimana *level of significance* (α) = 5% (0,05) dan *degree of freedom* (df) = (n - k) atau (32 - 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27) adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung > t-tabel (2,911 > 1,7033) dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y). Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan variabel Y. Jadi dapat disimpulkan Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

2. Pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Dana Alokasi Umum (Y)

Terlihat pada tabel *Coefficients* terdapat nilai sig. pada kolom = 0,616. Nilai sig. pada kolom lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,616 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Retribusi Daerah mempunyai t-hitung yakni 0,508 dengan t-tabel dimana *level of significance* (α) = 5% (0,05) dan *degree of freedom* (df)

= (n - k) atau (32 - 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27) adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung < t-tabel ($0,508 < 1,7033$) dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

3. Pengaruh Bagian Laba BUMD (X3) terhadap Dana Alokasi Umum (Y)

Terlihat pada tabel *Coefficients* terdapat nilai sig. pada kolom = 0,716. Nilai sig. pada kolom lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,716 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Bagian Laba BUMD mempunyai t-hitung yakni 0,368 dengan t-tabel dimana *level of significance* (α) = 5% (0,05) dan *degree of freedom* (df) = (n - k) atau (32 - 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27) adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung < t-tabel ($0,368 < 1,7033$) dapat disimpulkan bahwa variabel Bagian Laba BUMD (X3) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y). Nilai t negatif menunjukkan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7623486 880099,8 26	4	1905871 720024, 957	9, 7 6 1	,00 0 ^b
Residual	5271955 089075,6 74	2 7	1952575 95891,6 92		
Total	1289544 1969175, 500	3 1			

a. Dependent Variable:

DanaAlokasiUmum

b. Predictors: (Constant),

LainLainPADyangSah, RetribusiDaerah,
PajakDaerah, BagianLabaBUMD

bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bagian Laba BUMD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

4. Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah (X4) terhadap Dana Alokasi Umum (Y)

Terlihat pada tabel *Coefficients* terdapat nilai sig. pada kolom = 0,001. Nilai sig. pada kolom lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Variabel Lain-Lain PAD yang Sah mempunyai t-hitung yakni 3,535 dengan t-tabel dimana *level of significance* (α) = 5% (0,05) dan *degree of freedom* (df) = (n - k) atau (32 - 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27) adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung > t-tabel ($3,535 > 1,7033$) dapat disimpulkan bahwa variabel Lain-Lain PAD yang Sah (X4) memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X4 mempunyai hubungan yang searah dengan variabel Y. Jadi dapat disimpulkan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

4.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, nilai pada kolom sig. lebih kecil dari *level of significance* yang ditentukan (sebesar 5 %), atau F-hitung (pada kolom F) lebih besar dari F-tabel. F tabel dihitung dengan cara $df_1 = k-1$, dan $df_2 = n-k$, yaitu $df_1=5-1=4$ dan $df_2=32-5=27$, sehingga didapat nilai F-tabel (0,05;4;27) adalah sebesar 2,73. Sedangkan hasil uji F dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.6.
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Dari tabel di atas diketahui nilai F-hitung sebesar 9,761 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai F-hitung > F-tabel ($9,761 > 2,73$) maka dapat disimpulkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD Yang Sah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum. Hasil yang sama juga ditunjukkan dengan melihat nilai signifikansi pada kolom Sig. dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

4.5. Uji Determinan (R²)

Uji determinan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat hasil uji determinan maka dapat diketahui dari nilai *RSquare* atau koefisien determinasi dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,769 ^a	,591	,531	441879,61697

Tabel 4.7.
Hasil Uji Determinan (R^2)
Model Summary^b

- a. Predictors: (Constant), LainLainPADyangSah, RetribusiDaerah, PajakDaerah, BagianLabaBUMD
b. Dependent Variable: DanaAlokasiUmum
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Nilai *R Square* pada tabel diatas adalah 0,591, hal ini menunjukkan bahwa 59,1% variabel Dana Alokasi Umum dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD yang Sah sedangkan sisanya sebesar 40,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di

Pembahasan.

Dari hasil pengujian secara parsial, diketahui bahwa variabel Retribusi Daerah dan Bagian Laba BUMD yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel lainnya yaitu Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan. Sedangkan *R Square* atau koefisien determinasi sebesar 0,591 yang mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD Yang Sah (variabel independen) sebesar 59,1% sedangkan sisanya sebesar 40,9% (100% – 59,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

Secara parsial, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rumiris Agustina Sinaga (2008) yang menyatakan hanya

Pajak Daerah Pemerintahan Kota Tanjung Balai yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum. Sedangkan Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Tanjung Balai berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum dengan tingkat kepercayaan 95%.

- a) Pajak Daerah (X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Pajak Daerah mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,168 terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan jika Pajak Daerah yang dipungut Pemerintahan Kota Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintahan Kota Medan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan cita-cita otonomi daerah dimana ketika sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah) meningkat maka dana dari pusat (DAU) menurun sehingga mampu membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap dana dari pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.
- b) Retribusi Daerah (X2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,046 terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan jika Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintahan Kota Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintahan Kota Medan dari Pemerintah Pusat juga mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan cita-cita otonomi daerah dimana ketika sumber Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah) meningkat maka dana dari pusat (DAU) menurun sehingga mampu membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap dana dari pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.

c) Bagian Laba BUMD (X3) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Bagian Laba BUMD mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,081 terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan jika Bagian Laba BUMD yang dipungut Pemerintahan Kota Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintahan Kota Medan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan cita-cita otonomi daerah dimana ketika sumber Pendapatan Asli Daerah (Bagian Laba BUMD) meningkat maka dana dari pusat (DAU) menurun sehingga mampu membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap dana dari pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.

d) Lain-Lain PAD Yang Sah (X4) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Lain-Lain PAD Yang Sah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,088 terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan jika Lain-Lain PAD Yang Sah yang dipungut Pemerintahan Kota Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintahan Kota Medan dari Pemerintah Pusat juga mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan cita-cita otonomi daerah dimana ketika sumber Pendapatan Asli Daerah (Lain-Lain PAD Yang Sah) meningkat maka dana dari pusat (DAU) menurun sehingga mampu membiayai belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap dana dari pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.

Dari hasil pengujian secara simultan (serentak) dalam penelitian ini diketahui bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintahan Kota Medan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Dana Alokasi Umum. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F-hitung $>$ F-tabel (9,761 $>$ 2,73) yang artinya H_0 diterima atau secara simultan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% pada Pemerintahan Kota Medan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rumiris Agustina Sinaga (2008), yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintahan Kota Tanjung Balai secara simultan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
2. Analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
3. Analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bagian Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
4. Analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa Lain-Lain PAD Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

5. Analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

5.2. Saran

Penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan atau kekurangan. Oleh karena itu penulis mengajukan saran – saran, antara lain :

1. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk diteliti agar hasil penelitiannya dapat lebih akurat.
2. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti pengaruhnya secara terpisah menurut jenis masing-masing dari sumber-sumber PAD yang ada di pemerintahan tersebut.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintahan Kota Medan agar lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan juga Lain-Lain PAD Yang Sah sehingga jumlah PAD semakin tinggi. Dengan demikian dalam membiayai belanja daerahnya, Pemerintahan Kota Medan mampu melaksanakannya dari pos Pendapatan Asli Daerah sehingga cita-cita otonomi daerah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2016. **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara**, Medan.

Bastian, Indra, 2002. **Sistem Akuntansi Sektor Publik: Buku Satu**, Salemba Empat, Jakarta.

Ghozali, Imam, . 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang

<http://duwiconsultant.blogspot.co.id/2011/11/uji-autokorelasi.html?m=1>

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/17/cara-membaca-tabel-t/>

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/18/cara-membaca-tabel-f/>

<http://lkeb.umm.ac.id/files/file/tabel-dw.pdf>

<http://tugastugasekonomi.blogspot.co.id/2015/08/apa-sumber-sumber-pad-pendapatan-asli.html?m=1>

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/vieu&id=2213>

https://www.google.co.id/search?site=&source=hp&ei=dGIPWMj5HIzLvgSar47oDw&q=dana+alokasi+umum+adalah&oq=dana+alokasi+umum+adalah&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0j0i22i30k113.43.3371.0.4042.16.12.0.0.0.1786.9423.3-2j3j2j1j3j1.12.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp.4.12.9418.BrYp8cn2Guk

<http://www.fennisupriadi.com/tabel-f.pdf>

<http://www.fennisupriadi.com/tabel-t.pdf>

<http://www.pemkomedan.go.id>

<http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-multikolonieritas-dengan-melihat.html?m=1>

<http://www.statistikian.com/2012/09/uji-normalitas-dengan-kolmogorov-smirnov-spss.html>

Kuncoro, Mudrajad, 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi**,

- Perencanaan, Strategi, dan Peluang**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nababan, Tiodora D., 2007. **Analisis Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu**, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Ayu Diana., 2016. **Analisis Pengaruh Kemampuan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Operasi Dan Belanja Modal Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya**, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Siahaan, Marihot P., 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidik, M., 2003. **Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasi Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 Terhadap Keuangan Negara Tahun 2003 Terhadap Keuangan dan Kelembagaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Jakarta.
- Sinaga, Rumiris Agustina., 2009. **Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintahan Kota Tanjung Balai**, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Supriadi, 2016. **Metode Penelitian**, Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad, 2002. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.